

KIM

Ace Hasan Minta Pemerintah Mutakhirkan Data BLT BBM Agar Tepat Sasaran

Updates. - KIM.WEB.ID

Sep 7, 2022 - 06:37



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII [DPR RI Ace Hasan Syadzily](#) meminta pemerintah memutakhirkan data bantuan langsung tunai ([BLT](#)) bahan bakar minyak ([BBM](#)), agar akurat dan tepat sasaran. Hal itu, kata Ace, agar subsidi [BLT](#) [BBM](#) benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial (Bansos) agar mereka yang berpenghasilan rendah tidak terdampak terlalu dalam atas kebijakan pemerintah menaikkan harga [BBM](#).

“Kenaikan harga [BBM](#) ini dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan beberapa komoditas, terutama komoditas kebutuhan pokok masyarakat sehingga pemerintah harus dapat menekan dan mengendalikan dampak tersebut,” kata Ace dalam keterangan pers yang diterima Media, Selasa (6/9/2022).

Politisi Partai [Golkar](#) itu mengatakan, [BLT](#) [BBM](#) yang dilakukan dengan cash transfer dipastikan penggunaannya untuk belanja kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, Ace meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan distribusi [BLT](#) [BBM](#) berjalan cepat, tepat, dan akurat.

Untuk memastikan validasi data penerima [BLT](#) [BBM](#), maka Kemensos perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait lain guna menuntaskan persoalan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data bantuan sosial tersebut. “DTKS ini dikelola Kementerian Sosial dan digunakan bukan hanya untuk Kementerian Sosial saja, namun juga digunakan kementerian lain, seperti Kementerian Kesehatan untuk BPJS, Kementerian [ESDM](#) untuk subsidi listrik, dan lain-lain,” tutur Ace.

Legislator dapil Jawa Barat II itu mengatakan, agar ada pendekatan integratif dan komprehensif dalam hal pemutakhiran data, maka Kemensos harus memadankan DTKS dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tak terkecuali, kata Ace, mendorong peran pemerintah daerah (pemda) agar lebih proaktif dalam melakukan verifikasi maupun validasi DTKS.

Selain itu, Kemensos harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar pemda turut serta melakukan pendataan penerima bantuan sosial tersebut. “Hal ini dilakukan agar bansos [BLT](#) [BBM](#) betul-betul tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat yang memang membutuhkan,” pungkas Ace. (rnm/sf)